

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Peranan sumber daya manusia sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini berarti untuk mencapai kesuksesan dapat diwujudkan dengan cara mengelola sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Sumber daya manusia yang baik tidak hanya di nilai dari kualitas, melainkan karakter dan kepribadian juga menjadi salah satu hal penting dalam memilih sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitannya sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dan juga tinjauan masalah dalam suatu organisasi untuk memiliki karyawan yang mempunyai kinerja efektif dan efisien. Menurut (Gibson 1996), ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan seperti, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, etnis, dan status pernikahan. Saat ini marital status (status pernikahan) termasuk salah satu pertimbangan bagi suatu organisasi untuk merekrut karyawan baru.

Kedudukan status pernikahan seseorang dalam teori kontrol sosial (Hirschi, 1969) dapat diartikan sebagai sumber ikatan sosial dalam bentuk komitmen. Seseorang mungkin tidak melakukan kegiatan menyimpang yang dapat mengancam pekerjaan mereka atau ikatan pernikahan. Oleh karena itu, komitmen seseorang pada sesuatu hal termasuk dalam hal perkawinan, dapat berfungsi

sebagai sumber kontrol sosial. Pernyataan ini dapat memberikan implikasi bahwa jika seseorang yang tidak terikat oleh suatu komitmen pernikahan maka dia cenderung tidak memiliki kecemasan bahwa akan kehilangan ikatan pernikahan yang dibangunnya tersebut.

Pernikahan merupakan pusat perdebatan teoritis mengenai stabilitas dan perubahan pidana atas permasalahan kehidupan (King, Massoglia, & MacMillan, 2007). Namun, tidak seperti ikatan sosial lainnya seperti pekerjaan, pernikahan dipandang berbeda karena tidak dapat secara langsung berhubungan dengan efek pernikahan pada tindakan kriminal.

Perkembangan saat ini mana kala perempuan dan laki-laki semakin mengarah pada posisi kesetaraan dalam akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan penghasilan maka terjadi kecenderungan meningkatnya kemandirian perempuan terhadap laki-laki. Semakin banyak perempuan yang mampu menopang penghidupannya melalui pekerjaannya sendiri menjadikan ketergantungan perempuan kepada laki-laki semakin berkurang. Oleh karena itu seseorang yang menikah dapat dianggap menanggung biaya oportunitas yang lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang tidak dalam ikatan perkawinan.

Beberapa sumber lain menjelaskan bahwa perkawinan atau status pernikahan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual (Regan, 2003; Olson & DeFrain, 2006; Seccombe & Warner, 2004). Menurut Kropp (2002) pada hakekatnya perilaku manusia berorientasi pada tujuan

dan umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai tujuan, sedangkan dasar dari setiap individu adalah aktivitas.

Dalam hal aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial, status pernikahan menjadi hal yang di pandang sangat penting untuk dibicarakan dikarenakan terdapat berbagai masalah dalam suatu hubungan pernikahan misalnya, menanggung beban biaya hidup, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama bekerja keras agar mampu mencukupi kebutuhan hidup bersama dengan cara meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Namun pada kenyataannya, seringkali sebuah status pernikahan menjadi sebuah masalah yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kedisiplinan kerja sehingga mempengaruhi produktivitas dalam bekerja yang dikarenakan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah berkeluarga. Tanggung jawab tidak hanya dibebankan untuk pekerjaan melainkan untuk keluarga juga harus menjadi prioritas bagi karyawan yang sudah menikah. Oleh karena itu seringkali terjadi keterlambatan saat bekerja dan target pekerjaan yang tidak terselesaikan tepat pada batasan waktu yang ditentukan oleh perusahaan.

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik sudah sewajarnya dituntut untuk lebih disiplin dan produktif dalam bekerja agar suatu pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Semua anggota dalam sebuah Pemerintahan Daerah harus

mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya masing-masing. Seringkali terjadi hal-hal yang dianggap menyimpang bagi sebagian pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang PNS mengakibatkan pelayanan publik menjadi terhambat. Banyak anggapan bahwa status pernikahan menjadi salah satu penyebab PNS kurang disiplin dan produktif dalam melakukan pekerjaan. Dalam kaitannya sebagian besar PNS di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sragen yang berstatus menikah maupun belum menikah.

Berdasarkan pertimbangan yang telah penulis uraikan diatas dan melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui, menganalisa, dan mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut. Untuk itu, penulis mengangkatnya dalam suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Marital Status Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Produktivitas Kerja (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sragen)”**. Penulis melakukan penelitian menggunakan beberapa referensi jurnal sebagai pedoman, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel independen yaitu kedisiplinan kerja dan marital status sebagai variabel moderator. Sedangkan variabel dependen yaitu produktivitas kerja studi kasus pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sragen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Apakah marital status berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja?
2. Apakah marital status berpengaruh terhadap produktivitas kerja?
3. Apakah kedisiplinan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja?
4. Apakah hubungan antara kedisiplinan kerja dengan produktivitas kerja dimoderasi marital status?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh marital status terhadap kedisiplinan kerja.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh marital status terhadap produktivitas kerja.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kedisiplinan kerja terhadap produktivitas kerja.
4. Untuk mengetahui apakah marital status memoderasi hubungan antara kedisiplinan kerja dengan produktivitas kerja.

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Penelitian ini membatasi pada:

1. Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen yang sudah menikah dengan yang belum menikah.
2. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai kedisiplinan kerja yang mempengaruhi produktifitas kerja studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai Marital Status sebagai variabel moderating, kedisiplinan kerja dan Produktivitas kerja.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang SDM yang berkaitan dengan pengaruh marital status dan kedisiplinan kerja terhadap produktivitas kerja studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas masing-masing Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.
- c. Sebagai bahan evaluasi bagi para pegawai untuk lebih menjaga kedisiplinan dan produktivitas kerja.
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Bertujuan untuk memberikan urutan pembahasan dalam melakukan penulisan hasil penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penulis dan dasar dalam melakukan analisis dalam penelitian

ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka akan membentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan diuji.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, pemilihan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta model dan teknik analisis data. Bab ini dijadikan landasan analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi hasil dari analisis data berdasarkan data-data penelitian yang telah diperoleh dan dikumpulkan, beserta pembahasannya.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan dalam penelitian berikutnya.